

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	2
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak
Media Online	Solopos

Wilayah: Kabupaten Sukoharjo

Halaman 15

Akurasi Data Kepesertaan JKN Jadi Catatan

RAIHAN OPINI WTP 7 KALI

BONY EKO WICAKSONO

SUKOHARJO—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo kembali mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah (Jateng). Pemkab meraih opini WTP tujuh kali berturut-turut sejak 2015.

Penyerahan penghargaan opini WTP dilaksanakan di Kantor BPK Perwakilan Jawa Tengah di Semarang, Jumat (13/5/2022). Hasil pemeriksaan LKPD 2021 diterima Bupati Sukoharjo, Etik Suryani didampingi Ketua DPRD Sukoharjo, Wawan Pribadi. BPK Jateng juga menyerahkan hasil pemeriksaan LKPD 2021 dengan opini WTP untuk Kabupaten Klaten, Batang, dan Grobogan.

Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, menyebut opini WTP itu merupakan bukti nyata kinerja pemerintah dalam mengelola tata keuangan daerah dan manajemen aset daerah.

“Prestasi ini harus dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya. Kinerja masing-masing organisasi perangkat daerah [OPD] terus ditingkatkan,” kata dia, Sabtu (14/5/2022).

Ada beberapa indikator penilaian opini WTP, seperti tata kelola keuangan daerah dan sistem pengendalian internal di setiap OPD. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara akuntabel dan profesional. Hal itu harus disajikan melalui laporan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan.

Bupati menyebut koordinasi lintas sektoral perlu diperkuat untuk merampungkan beragam permasalahan dan tantangan yang kian berat pada masa mendatang. “Setiap OPD dituntut lebih inovatif dan kreatif dalam menjalankan tugas, pokok, dan fungsi. Sehingga, setiap OPD bisa menciptakan terobosan-terobosan baru di bidangnya masing-masing,” imbuh dia.

Inspektur Sukoharjo, Djoko Poernomo, menyatakan ada beberapa catatan khusus BPK Jateng atas LKPD di setiap daerah.



Ini menjadi pekerjaan rumah dan tugas yang harus diselesaikan tahun ini. Harapannya, Pemkab Sukoharjo bisa mempertahankan opini WTP.”

Pengelolaan aset daerah masih menjadi masalah yang harus dibenahi secara serius. Selama ini, Pemkab Sukoharjo terus meningkatkan kinerja dalam pengelolaan aset daerah.

BPK Jateng juga menyoroti data realisasi pembayaran iuran kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) belum akurat. “Ini menjadi pekerjaan rumah dan tugas yang harus diselesaikan pada tahun ini. Harapannya, Pemkab Sukoharjo bisa mempertahankan penghargaan opini WTP pada tahun depan,” kata dia. 